



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725, 7054414 Facs. (0751) 7059511

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 622.4 / 553 / PPHMA - 2019

TENTANG  
KEGIATAN PENYIAPAN PERHUTANAN SOSIAL

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mensukseskan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat atau Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan (HKM/HN/HTR/HRK) Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat, perlu dilaksanakan Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial;
  - bahwa penyelenggaraan Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial Tahun 2019 pada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus memenuhi kriteria tertib, efektif dan efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel;
  - bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kehutanan;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
  - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ MenLHK-II/2016 tentang Perhutanan Sosial;



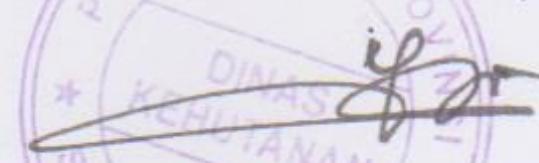
KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal : 11 Februari 2019

KEPALA DINAS,



**YOZARWARDIUP, S.Hut, M.Si**

NIP. 196904061997011002

Tebusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kuasa Pengguna Anggaran DPA SKPD Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dishut Prov. Sumbar di Padang.
7. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
8. Arsip.

# PETUNJUK PELAKSANAAN

## KEGIATAN PENYIAPAN PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2019



Disusun Oleh :

**BIDANG PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
HUTAN ADAT DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PADANG, JANUARI 2019**



## Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-NYA maka *Petunjuk Pelaksanaan* Penyiapan Perhutanan Sosial Tahun 2019 ini dapat diselesaikan. *Petunjuk Pelaksanaan* ini dimaksudkan untuk membuat acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan Penyiapan Perhutanan Sosial.

Pembangunan Perhutanan Sosial dengan skema HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan adalah salah satu kebijakan revitalisasi sektor kehutanan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui pemberian akses yang lebih luas terhadap pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pemberian akses ke Lembaga Pembiayaan Pembangunan Hutan dan akses ke pemasaran hasil hutan (industri). Kelompok sasaran pembangunan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan ini adalah masyarakat sekitar hutan produksi dan hutan lindung yang dalam aktifitas ekonominya bergantung pada hutan dan hasil hutan.

Akhir kata, petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksana kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Padang, Februari 2019

**KEPALA BIDANG**  
Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat  
Dan Hutan Adat



**YONEFIS, SH, MM**

NIP. 19621102 198503 1 005



## KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD	:	DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Unit Eselon III/IV	:	BIDANG PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN HUTAN ADAT
Program	:	Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Hasil (Outcome)	:	Usulan Perhutanan Sosial
Kegiatan	:	Penyiapan Perhutanan Sosial
Indikator K. Keg	:	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
Keluaran (output)	:	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan kelompok/lembaga masyarakat dalam pengusulan dan pengelolaan HN, HKm, HTR, HA dan HR Kemitraan.
Volume	:	10 unit

### I. LATAR BELAKANG

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ MenLHK-II/2016 tentang Perhutanan Sosial;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial ini dibuat agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan .

Padang, Februari 2019

KEPALA BIDANG  
PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN HUTAN ADAT DISHUT PROV SUMBAR



**YONEFIS, SH, MM**  
NIP. 19631102 198503 1 005





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725, 7054414 Facs. (0751) 7059511

Nomor : 10/Und/PPMHA.2019

Padang, 4 Februari 2019

Lamp. :

Kepada Yth,

Perihal : Undangan Persiapan Kegiatan

Bapak/Ibu Staf Bidang Penyuluhan  
Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat  
di-

**Tempat**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial Tahun Anggaran 2019, bersama ini kami harapkan kehadiran Bapak/ibu pada:

Hari/Tanggal : Jumat/8 Februari 2019

Waktu : 09.00 Wib sampai selesai

Tempat : Ruang Rapat Kepala Bidang PPMHA

Acara : Rapat Persiapan Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial Tahun  
Anggaran 2019

Demikian undangan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Atas perhatian dan kehadirannya,  
diucapkan terima kasih.

KEPALA BIDANG PPMHA

  
YONEFIS, SH, MM

NIP. 19621102 198503 1 005



## DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Jumat / 8 Februari 2018  
 WAKTU : 09<sup>00</sup> WIB s/d 12<sup>30</sup> WIB  
 TEMPAT : Ruang Rapat Kepala Bidang PPMKA  
 ACARA : Rapat Persiapan Kegiatan Penyiapan Berbutanan Sosial Anggaran 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	TITO TRIO PUTRA	re HAK	1
2	KUSWORO	bie PM	2
3	JSMOW	staf HAK	3
4	Mariyanti	Penyuluh tekhn	4
5	Astiningrih	staf PM	5
6	Hendri R	Staf PM	6
7	Eli Rosita	staf PM	7
8	Ridha Suryani	staf penyuluh	8
9	Lismai Amta	staf peny	9
10	Maman	staf penyuluh	10
11	Romi Sanjaya	Staf Penyuluh	11
12	Ardan Yulian	Staf Hak	12
13	HARWIZO	Staf PM	13
14	Sayonita	staf HAK	14
15			15
16			16
17			17

Pemimpin Rapat,

*Kusworo, SP, MSi*